

BAB II	<i>Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu</i>
-------------------	--

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Tahun 2018 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2019 (n), sehingga realisasi capaian target Renja masih sebatas perkiraan. Evaluasi realisasi capaian target Renja ini juga melihat secara akumulatif dari tahun awal Renstra PD (n-2 dan n-3), untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan kerja yang telah direncanakan; Sehingga PD dapat mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, selain itu juga dapat mengetahui program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

A. Realisasi program/kegiatan Tahun 2017 dan Tahun 2018

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kendala kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator masukan (input), Keluaran (output) dan hasil (outcome). Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Sebagai gambaran capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2017 berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan walaupun terjadi



rasionalisasi anggaran. Pagu Dana Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2017 sebesar Rp. 2.645.670.708,61 setelah adanya rasionalisasi berubah menjadi sebesar Rp. 2.602.361.207,- dan mendapat tambahan kegiatan penelitian umum pada APBD-Perubahan yaitu Kajian Identifikasi Tingkat Kerusakan Mangrove untuk perencanaan Reboisasi pada Delta Mahakam sebesar Rp.500.000.000,-. Adapun Realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 adalah sebesar 95,00 % (Realisasi Fisik) dan 82,22 % (Realisasi Keuangan).

Secara umum capaian kinerja program/kegiatan di Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 hingga penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2019 ini berjalan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah di tetapkan.

Pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 3.475.412.548,00,- Adapun kegiatan pada triwulan I (Januari 2018) masih dalam tahap penyelesaian administrasi DPA, proses penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan petugas pendukung lainnya serta kelengkapan administrasi keuangan lainnya.

Kegiatan Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 pada Triwulan I adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 903.738.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.600.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	23.030.000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	83.490.600
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000



5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	37.500.000
7	Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	351.470.400
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.972.000
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	200.000.000
11	Pengelolaan Website Balitbangda Kutai Kartanegara	22.675.000

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		255.688.000
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.592.000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	44.146.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	72.000.000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	27.225.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000
7	Penerbitan Buletin dan Jurnal Ilmiah Sebagai Media Komunikasi	56.725.000



c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		111.109.000
1	Penguatan Perpustakaan E-Library	59.000.000
2	Fasilitas Manajemen Perubahan	52.109.000

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		120.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta dan Laporan Kinerja	80.000.000
2	Penyusunan Laporan Keuangan	40.000.000

e. Program Penelitian Umum

Program Penelitian Umum		2.084.877.548
1	Riset Cepat Tentang Isu Strategis dan Isu Aktual	84.877.548
2	Identifikasi Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove Untuk Perencanaan Reboisasi Pada Delta Mahakam Di Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000
3	Kajian Sosial dan Budaya Masyarakat Di Sekitar dan Di Dalam Kawasan Rencana Taman Hutan Raya Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000
4	Kajian Ekonomi Masyarakat Di Sekitar dan Di Dalam Kawasan Rencana Taman Hutan Raya Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000
5	Kajian Teknis Pembentukan Kawasan Taman Hutan Raya Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000



B. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum target kinerja pada tahun anggaran 2017 tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu terjadi rasionalisasi anggaran sebesar 1,64 % (Rp. 43.309.501,61,-) dari pagu sebesar Rp. 2.645.670.708,61 menjadi sebesar Rp. 2.602.361.207,-.

Pada APBD-Perubahan Tahun 2017 terjadi penambahan kegiatan penelitian umum yaitu Kajian Identifikasi Tingkat Kerusakan Mangrove untuk perencanaan Reboisasi pada Delta Mahakam sebesar Rp.500.000.000,- namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena selain DPA baru keluar tanggal 30 Oktober 2017 juga keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian.

C. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra Balitbangda tahun 2016 – 2021 maka pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja 95,00 % (Realisasi Fisik) dan 82,22 % (Realisasi Keuangan).

Berdasarkan target capaian program pada Renstra tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 secara umum mampu memenuhi target capaian program pada Renstra Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja program / kegiatan adalah pengalokasian anggaran kegiatan harus melihat kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat



meningkatkan kualitas dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan selama satu tahun dalam tahun perencanaan (n-1).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018) maka dibuat tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD tahun 2016 – 2021 (Tabel Terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyusunan Renstra PD mengacu pada Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Renstra PD diatur dengan Peraturan penyusunan Renstra Balitbangda ini berpedoman pada Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan 9 (sembilan) prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kebijakan Pembangunan Nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 juga tetap memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah; Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah PD melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.



Tolak ukur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di tahun ke 2 (dua) Renstra Tahun 2016-2021 mempunyai tiga sasaran dan indikator yaitu :

- a. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas sesuai kebutuhan daerah, dengan indikator Cakupan dokumen kelitbangan yang dilaksanakan.
- b. Termanfaatkannya rekomendasi sebagai bahan penyusunan kebijakan sesuai kebutuhan daerah, dengan indikator Persentase kelitbangan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- c. Tersedianya publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung riset atau referensi perumusan kebijakan, dengan indikator Jumlah publikasi mandiri dan berkala yang diberikan atau dipublikasikan kepada pemangku kepentingan

Tiga sasaran dan indikator tersebut telah dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang dihasilkan Tahun ke 2 (dua) Renstra Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

No	Sasaran /Indikator	Nilai Capaian
1.	Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas sesuai kebutuhan daerah	93,33 %
2.	Termanfaatkannya rekomendasi sebagai bahan penyusunan kebijakan sesuai kebutuhan daerah	93,33 %
3.	Tersedianya publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung riset atau referensi perumusan kebijakan	100 %



1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2019. Keberhasilan pencapaian sasaran akan diketahui berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan sasaran telah terlaksana.

Adapun sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas sesuai kebutuhan daerah, dengan indikator cakupan dokumen kelitbangan yang dilaksanakan.
- b. Termanfaatkannya rekomendasi sebagai bahan penyusunan kebijakan sesuai kebutuhan daerah, dengan indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh pemangku Kepentingan.
- c. Tersedianya penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK, dengan indikator cakupan publikasi mandiri dan berkala yang diberikan atau dipublikasikan kepada pemangku Kepentingan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

- A. Menentukan permasalahan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan Renja PD, serta capaian kinerja Renstra PD tahun sebelumnya, yaitu :
 - 1) Belum optimalnya ASN balitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
 - 2) Belum Optimalnya jejaring atau kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi / OPD lainnya
 - 3) Hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Balitbangda belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh OPD dan stakeholder lainnya
 - 4) Bangunan kantor yang representative yang dapat menampung seluruh karyawan / pegawai dengan segala aktivitasnya.



- a) Ruang Musholla.
- b) Ruang seminar, diskusi, presentasi dan lain-lain dilengkapi meubelair dan sound sistemnya.
- c) Ruang rapat staf lengkap dengan meubelair dan sound systemnya.
- d) Ruang perpustakaan.
- e) Ruang data.
- f) Ruang untuk Jabatan Fungsional Peneliti.
- g) Ruang untuk Dewan Pakar Tenaga Ahli Riset.
- h) Ruang Tenaga Analisis.
- i) Ruang Laboratorium
- j) Penambahan pemasangan Internet.
- k) Penambahan pemasangan Local Area Network (LAN).
- l) Gudang dan Ruang kearsipan.
- m) Penambahan meubelair untuk staf.
- n) Penambahan jumlah kendaraan roda empat dan roda dua.
- o) Mesin foto copy.
- p) Penambahan jumlah computer (1 orang 1 Komputer).
- q) Sarana Dokumentasi (Tustel, Handycam, Scanner).
- r) Televisi.
- s) Layar presentasi PC Viewer dan LCD.

B. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional/ internasional, SPM dan MDGs.

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbang secara optimal masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai;
2. Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbang dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;
3. Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;



4. Pedoman, data dan informasi pembangunan daerah masih belum lengkap dan akurat sebagai bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 5. Hasil penelitian belum dimanfaatkan secara maksimal oleh SKPD maupun Kab./Kota terkait sebagai pengembangan;
- C. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah :
1. *Good governance* yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan dan implementasikan kepada wujud pelaksanaan yang lebih nyata dan bertanggungjawab;
 2. Tuntutan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih 2016-2021 yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021;
 3. Tuntutan *stakeholders* terhadap publikasi hasil litbang;
 4. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal;
 5. Hasil-hasil / *outcome* penelitian yang belum diimplementasikan oleh PD yang ada;
 6. Belum tersedianya laboratorium iptek dan riset litbang daerah;
- D. Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah :
1. Program dan kegiatan dibidang kelitbangan daerah kedepan dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
 2. Program dan kegiatan dibidang kelitbangan daerah kedepan dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan peningkatan Standar Pelayanan Minimal khususnya dibidang kelitbangan daerah.
 3. Program dan kegiatan dibidang kelitbangan daerah kedepan dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan peningkatan pelayanan pemerintah daerah.
- E. Formulasi Isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.



1. Program Inovasi Daerah

- Kajian inovatif pengembangan kelembagaan usaha masyarakat dalam rangka mendukung revolusi jagung Kabupaten Kutai Kartanegara
- Inventarisasi tanaman padi spesifik lokal sebagai sumber plasma nuftah di Kutai Kartanegara
- Pengembangan teknologi budidaya jagung (demplot, teknologi pasca panen dan agroindustri komoditas jagung)

2. Program Penelitian Umum

a. Cakupan Ketersediaan Kebijakan Daerah

- Riset Cepat Tentang Isu Strategis dan Isu Aktual
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kab. Kutai Kartanegara
- Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) di Kab. Kutai Kartanegara

b. Cakupan Bidang Pemerintahan :

- Kajian Optimalisasi Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Urusan Pemerintahan Wajib Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kab. Kutai Kartanegara
- Kajian tentang penataan dan pembinaan pasar Tradisional, pusat Perbelanjaan dan toko modern berdasarkan Perda No. 6 tahun 2012
- Kajian Pola Pengembangan Karier ASN Kab. Kutai Kartanegara

c. Cakupan Bidang Ekonomi dan Pembangunan:

- Kajian Sistem Tataniaga pemasaran komoditi jagung dan padi.
- Kajian Produksi dan Sistem Tataniaga Pemasaran Komoditi Rumput Laut.
- Analisis Kebutuhan Pasar Ternak di Kab. Kutai Kartanegara



d. Cakupan Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan :

- Kajian Penelusuran Sejarah Kerajaan Kutai Mulawarman.
- Kajian Identifikasi Penanganan Penyakit Seksual dan Penyakit Sosial di Kutai Kartanegara

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal dan Renstra PD pada Tahun 2019

Rancangan awal RKPD Tahun 2016 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD Tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan PD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel; sehingga aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan salah satu PD yang berperan strategis dalam pemberian rekomendasi terhadap pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan Kutai Kartanegara dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa dan kecamatan juga mengalami perubahan yang nyata.

Akselerasi transformasi penelitian, kajian dan pengembangan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi penelitian, kajian dan pengembangan di Badan Penelitian dan



Pengembangan Daerah membutuhkan sinergitas antara semua PD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik alokasi anggaran untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya.

Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melihat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel terlampir pada Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja.

Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun PD di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi serta isu-isu aktual dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perda No 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016.

Rancangan rencana kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah didiskusikan dalam pembahasan Forum PD tingkat Kabupaten. Pembahasan



dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten.

Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

